

ETIK DAN KRITIK BERBASIS EDUKASI DALAM *PASANG AKSARA BALI: KAJIAN ETNOSEMANTIK*

Made Reland Udayana Tangkas
Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan
tangkas.udayana@gmail.com

Abstrak

Aksara Bali memiliki keunikan tidak hanya pada bentuk semata, tetapi lebih ditekankan kepada ejaan dan tata cara penulisan. Karakteristik “silabik” mengharuskan bentuk aksara Bali dipasangkan dengan penanda vokal (*pangangge suara*) dan beberapa penanda suku kata tertutup seperti *tengenan*, *gantungan*, dan *arda suara*. Pemasangan itu semua sarat akan aturan, tidak hanya dari sudut pandang ejaan semata tetapi secara implisit menyiratkan konteks etik dan kritik yang penting untuk diungkap sebagai sarana edukasi. Dengan demikian, permasalahan yang dikaji meliputi: 1) etik dan kritik dalam penggunaan *pangangge suara*, 2) etik dan kritik dalam penggunaan *tengenan*, dan 3) etik dan kritik dalam penggunaan *gantungan* dan *arda suara*. Secara umum, tujuan penelitian ini yaitu melestarikan keberadaan aksara Bali melalui penguatan fungsi dan makna di dalam kehidupan masyarakat Bali. Adapun tujuan khusus yaitu mendeskripsikan konteks etik dan kritik yang terkandung di dalam sistem penulisan ejaan aksara Bali. Data primer penelitian ini adalah yaitu “Pedoman Pasang Aksara Bali” yang dipublikasikan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, sedangkan hasil wawancara dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Data dikumpulkan dengan metode studi pustaka dibantu dengan teknik catat, dan metode wawancara dibantu dengan teknik kuesioner. Kemudian, data dianalisis menggunakan metode distribusional dan Pilah Unsur Penentu. Hasil analisis disajikan menggunakan metode deduktif dan induktif dibantu dengan teknik penulisan formal dan informal. Hasil penelitian ini mengungkapkan sistem ejaan atau *Pasang Aksara Bali* menjadi hal yang penting sebagai penyangga keberadaan Bahasa Bali di ranah kebudayaan. Pasang Aksara Bali patut dipahami tidak hanya sebagai sistem ejaan tetapi juga memuat makna dan nilai sosial budaya sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan etika dan budi pekerti. Dengan demikian, konteks etik dan kritik dalam *Pasang Aksara Bali* sangat penting ditularkan khususnya bagi kalangan pelajar dan generasi muda guna menguatkan keperibadian yang berkebudayaan.

Kata Kunci: *Aksara Bali; Etik dan Kritik; Etnosemantik*

Abstract

The Balinese script is unique not only in its form but also emphasizes spelling and writing procedures. The "syllabic" characteristic requires the Balinese script form to be paired with vowel markers (pangangge suara) and several closed syllable markers such as tengenan, gantung, and arda suara. These pairings are all full of rules, not only from a spelling perspective but also implicitly imply ethical and critical contexts that are important to reveal as a means of education. Thus, the issues studied include: 1) ethics and criticism in the use of pangangge suara, 2) ethics and criticism in the use of tengenan, and 3) ethics and criticism in the use of gantung and arda suara. In general, the aim of this study is to preserve the existence of the Balinese script by strengthening its function and meaning in the lives of Balinese people. The specific aim is to describe the ethical and critical contexts contained in the Balinese script

spelling writing system. The primary data of this research is the "Pedoman Pasang Aksara Bali" published by the Bali Provincial Cultural Office, while the results of interviews and literature studies are secondary data. Data were collected using a literature study method assisted by note-taking techniques, and the interview method assisted by a questionnaire technique. Then, the data were analyzed using the Distributional and the Determining Elements Selection method. The results of the analysis are presented using deductive and inductive methods assisted by formal and informal writing techniques. The results of this study reveal that the spelling system or Pasang Aksara Bali is important as a supporter of the existence of the Balinese language in the cultural realm. Pasang Aksara Bali should be understood not only as a spelling system but also contains socio-cultural meanings and values as a means of education for the community in order to foster ethics and character. Thus, the ethical and critical context in Pasang Aksara Bali is very important to be transmitted, especially to students and the younger generation in order to strengthen a cultured personality.
Keywords: *Balinese Script, Ethics and Criticism, Ethnosemantics*

1. Pendahuluan

Usaha pelestarian bahasa Bali yang juga mencakup ranah aksara dan sastra menjadi perbincangan yang tak pernah putus untuk ditularkan hingga direalisasikan ke dalam program-program yang bersifat konservatif hingga inovatif. Usaha tersebut nyatanya telah mendapat dukungan sejak lama yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 03 Tahun 1992 yang kemudian direvisi dan lahirlah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Tidak berhenti sampai di sana, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Gubernur No, 80 Tahun 2018 yang mengatur langsung tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Perlu dipahami bahwa keberhasilan dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali tidak mesti dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi peran serta masyarakat sangat diperlukan sehingga bahasa, aksara, dan sastra Bali itu tetap memiliki daya hidup (*language vitality*) (Antara, 2020). Hingga kini Bulan Bahasa Bali diselenggarakan dan berhasil merangsang geliat dan minat seluruh lapisan masyarakat khususnya generasi muda Bali.

Aksara Bali yang keberadaannya difungsikan sebagai sarana untuk menuliskan bahasa lisan nyatanya telah mengarungi riwayat yang panjang. Dahulunya, masyarakat Bali belum memiliki kesepakatan bersama mengenai tata penulisan (ejaan), sehingga penulisan aksara Bali tidak seragam dan hanya mengacu pada tradisi lama yang ditulis di dalam naskah lontar. Pada zaman kolonial Belanda, diterbitkan buku *Balinesche Schriftaal* karya Mas Nitisastro pada tahun 1918 dan *Tjontoh Menoelis Hoeroef Bali* karya I Wayan Gelgel pada tahun 1923 yang ternyata malah membuat kekacauan dan kebingungan (Antara, 2020). Selanjutnya, H.J.E.F. Swartz (1931) menerbitkan buku *Oeger-oeger Aksara saha Pasang Sasoratan Basa Bali*

Kapara. Usaha Schwartz justru membuat keadaan pasang aksara Bali semakin tak menentu karena banyak mengubah, menyederhanakan, dan bahkan menghilangkan aturan-aturan yang ada dalam pasang aksara sebelumnya (Antara, 2020).

Pada Tahun 1957 Pemerintah Daerah Bali mengadakan Pasamuhan Agung Basa Bali (Kongres Bahasa Bali 1) di Denpasar untuk membakukan sistem penulisan (pasang) Aksara Bali hingga disambut baik oleh para ahli dan praktisi bahasa Bali pada waktu itu. Hasil keputusan Pasamuhan agung 1957, telah diterbitkan berupa buku yang berjudul “Ejaan Bahasa Bali dengan huruf Latin dan huruf Bali”, karangan I Gst ketut Ranuh dan I Ketut Sukrata (Rai, 2013). Untuk menyempurnakan kembali hasil Pasamuhan Agung Basa Bali Tahun 1967, Pemerintah Daerah Bali kembali menyelenggarakan Pasamuhan Agung Alit pada tahun 1963. Pada Tahun 1997 Pemerintah Daerah Bali melalui Dinas Kebudayaan menyelenggarakan Loka Karya yang membahas Pasang Aksara Bali yang melahirkan Pedoman Pasang Aksara Bali diterbitkan pada tahun 1998. Berselang berpuluh tahun, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menyelenggarakan Pasamuhan Alit Basa Bali pada tahun 2019 yang memutuskan penggunaan aksara Bali dalam ruang yang lebih luas. Hingga akhirnya pada tahun 2023, Pasamuhan Agung Basa Bali kembali dilakukan untuk menyempurnakan Pedoman Pasang Aksara Bali sesuai dengan perkembangan era digital saat ini.

Berdasarkan Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018, penulisan aksara Bali di ruang publik seperti penulisan pada plang papan nama dengan dwi aksara tidak hanya diberlakukan untuk lembaga pemerintah dan lembaga adat saja, tetapi mencakup lembaga swasta hingga badan usaha (toko, warung, swalayan, restaurant, hotel, bandar udara, dan lain sebagainya). Hal tersebut memberi peluang aksara Bali untuk bisa menuliskan bahasa asing. Ini menandakan ruang dan media penulisan aksara Bali semakin luas dan melebar hingga menyentuh dunia internasional. Hal tersebut bertujuan agar intensitas masyarakat melihat dan membaca aksara Bali semakin sering, sehingga mampu menggugah keinginan untuk belajar. Namun pada kenyataannya, pemberlakuan tersebut belum sepenuhnya diindahkan khususnya oleh pihak badan usaha. Hal tersebut patut menjadi perhatian bersama agar sinergi pemerintah dan masyarakat dapat dijaga.

Menurut Agastya (2005) aksara Bali terdiri atas aksara *Wreastra*, aksara *Swalalita*, dan aksara *Modre*. Aksara *Wreastra* atau *Wianjana* merupakan kelompok aksara yang digunakan untuk menulis bahasa sehari-hari. Aksara *Swalalita* adalah kelompok aksara Bali yang digunakan untuk menuliskan kosa kata yang diserap dari bahasa Jawa Kuna atau Sanskerta. Aksara *Modre* merupakan golongan aksara suci yang dipercaya memiliki kekuatan magis

sehingga sering digunakan baik di dalam puja mantera, ritual, penyembuhan, hingga ilmu kebatinan (*kawisesan, kadyatmikan, pangleakan*, dan lain sebagainya). Berdasarkan golongan tersebut, dapat dikatakan bahwa, aksara Bali dalam ranah konseptual sebagai representasi visual bahasa secara konteks yang lebih luas menyangkut aspek-aspek diluar bahasa. Dengan demikian, konteks penulisan aksara Bali yang sangat erat dengan makna dan nilai budaya tidak kalah pentingnya untuk dikaji secara lebih mendalam.

Aksara Bali di dalam kebudayaan Bali dan tradisi keagamaan Hindu sangat dimuliakan setinggi-tingginya oleh masyarakat bahkan diposisikan sebagai mahkota budaya. Hal tersebut tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat Bali yang menganggap aksara Bali sebagai stana Sang Hyang Aji Saraswati. Hal tersebut nampak di setiap hari suci Saraswati yang jatuh pada Sabtu (*Saniscara*), kliwon, wuku watugunung sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Pada saat itu, pustaka-pustaka suci khususnya lontar beraksara Bali disucikan. Inti dari peringatan terhadap aksara yang dilakukan tiap enam bulan sekali oleh masyarakat Bali merupakan wujud penghormatan, penghargaan, dan kecintaan terhadap nilai religius yang terkandung dalam aksara (Duija, 2017). Hal tersebut menandakan, di balik pasang aksara Bali sebagai kaidah sistem penulisan, tercermin aspek etik yang tidak patut dilanggar secara normatif dan kebahasaan. Etik atau etika dalam aturan pasang aksara Bali tidak hanya menyangkut sistem penulisan yang baku, tetapi juga secara ekspilisit merujuk kepada cerminan etika sosial dan budaya.

Etika sosial adalah cabang dari etika yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam konteks masyarakat. Ini adalah seperangkat prinsip, nilai, dan norma yang mengatur bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat (Kamaruddin et al., 2023). Dalam pengertian di atas, etika sosial nampaknya beririsan dengan konsep kritik sebagai alat kendali bilamana aturan dilanggar secara etik. Kritik adalah suatu evaluasi dan analisis yang cermat mengenai suatu hal, kondisi, karya seni, hingga kebijakan yang biasanya disertai pertimbangan baik dan buruk (Setiabudy, 2025). Sebagai alat kendali dan bersifat evaluatif, kritik patut disampaikan secara benar dan mengindahkan etika. Sehingga, kritik dapat membantu terjadinya proses refleksi dan evaluasi diri dari pihak yang dikritik (Setiabudy, 2025).

Pasang Aksara Bali berdasarkan Pedoman Pasang Aksara Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali (Tim Penyusun, 2002) tidak hanya menyangkut *aksara lagna* (bentuk aksara pokok baik *wianjana* atau *swalalita*) tetapi juga melibatkan *gantungan, gempelan, tengenan, arda suara* (semi vokal), dan lain sebagainya. Dalam arti lain, sistem penulisan aksara Bali mengangkat

analogi kosmologi manusia antara tubuh/badan dan pakaian/atribut (*pangangge aksara*). Maka konsep etik menjadi ranah penting dikala aksara dimuliakan sama seperti manusia. Kritik atas etik dalam pasang aksara Bali secara kontekstual menjadi interaksi literasi yang berorientasi kembali kepada manusia beserta sifat-sifatnya. Dengan demikian, etik dan kritik yang tercermin di dalam pasang aksara Bali (khususnya *gantungan, tengenan, dan arda suara*) layak untuk dipentingkan.

Jika ditelusuri, penelitian terkait aksara Bali telah banyak dilakukan baik dari para akademisi, maupun mahasiswa dalam publikasi tugas akhir. Adhiti, Artajaya, dan Pidada (2021) meneliti Pemberdayaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Bali terhadap Penyuluh Bahasa Bali. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa peran penyuluh bahasa Bali sebagai perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan akademisi dan praktisi sangat penting dalam rangka pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Kemudian, Paramarta, Martha, dan Astiti (2024) meneliti Pemetaan Aksara-Silabel Berbasis Grafem Aksara Bali dalam Kamus Bali – Indonesia Beraksara Latin dan Bali Tahun 2016. Hasil yang dikemukakan yaitu grafem aksara Bali terbukti merepresentasikan unit kebahasaan berupa silabel dalam bahasa Bali dengan pola CV (Konsonan-Vokal) dan V (Vokal). Selain itu, ditemukan pula grafem aksara Bali yang merepresentasikan silabel dengan pola CV tetapi hanya untuk konsonan /l/ dan /r/ serta vokal melekatnya adalah /ə/ (/Cə/), yaitu grafem *lelenga* <> /lə/ dan *rerepa* <> /rə/. Selanjutnya, Pusparini, Aryana, dan Purnami (2020) meneliti Analisis Kesalahan Dalam Penulisan Aksara Bali Pada Papan Nama Instansi Se-Kecamatan Buleleng dengan mengemukakan bahwa penulisan papan nama sekolah dan instansi Kecamatan Buleleng, telah dilakukan dengan baik. Dari 29 kelurahan yang diamati, hanya 26 kelurahan yang menerapkan penggunaan aksara Bali pada papan nama sesuai Pergub Bali No. 80 Tahun 2018 dengan sejumlah kesalahan penulisan.

Dari beberapa penelitian terkait aksara Bali, terbukti bahwa penelitian yang membahas aspek konteks di balik aturan pasang aksara Bali belum pernah dilakukan. Untuk dapat mengungkapkan konteks etik dan kritik dalam pasang aksara Bali, perspektif Etnosemantik menjadi pilihan yang tepat. Pendekatan etnosemantik merupakan perpaduan analisis semantik dan etnolinguistik yang digunakan untuk mengkaji dan menginterpretasikan makna kata dan kalimat tuturan (verbal) serta tindakan (nonverbal) (Yunira et al., 2019). Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan makna leksikal (lexical meaning), makna gramatikal (grammatical meaning) serta mengkaji hubungan bahasa (tuturan verbal dan nonverbal) dengan konteks budaya penuturnya untuk menemukan nilai-nilai penting sebagai pedoman hidup

masyarakat setempat (Leba, Mare, dan Lein, 2024). Bentuk-bentuk aksara Bali dan atributnya sebagai visualisasi bunyi bahasa mengisyaratkan makna budaya yang erat kaitannya dengan etika bahasa dan sosial serta kritik terhadap dinamika sosial.

2. Metodologi

Penelitian etik dan kritik berbasis edukasi yang tercermin di dalam pasang aksara Bali ini menggunakan pendekatan Etnosemantik. Penelitian etnosemantik mengkaji makna bahasa yang digunakan dalam konteks sosial budaya masyarakat tertentu (Maharani & Nugrahani, 2019). Pendekatan ini berpijak pada pandangan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan sekaligus membentuk sistem nilai, kepercayaan, dan praktik budaya masyarakat penuturnya (Cassar, 2024; Leba, Mae, Lein, 2025). Berdasarkan pengertian di atas, Etnosemantik memiliki kedudukan pendekatan secara teoritis yang menekankan aspek makna (semantik) berkaitan erat dengan aspek budaya (etnografi). Hal ini menandakan bahwa suatu bahasa tertentu (mencakup sistem keberaksaraan, dan kesusastraannya) tidak lepas dari pemaknaan secara budaya masyarakat penuturnya. Aksara Bali sebagai visualisasi bunyi bahasa yang bersifat silabik dengan sistem ejaannya yang tidak semata sebagai kaidah kebahasaan tetapi juga mengisyaratkan kaidah etik dan kritik terhadap dinamika sosial.

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif-kualitatif dengan mengacu kepada bentuk data secara kualitatif yaitu aturan penulisan aksara Bali (Pasang Aksara Bali yang berlaku sekarang) dan sejumlah informasi yang didapatkan dari narasumber dalam proses wawancara. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka yaitu mengamati Pedoman Pasang Aksara Bali yang dibantu dengan teknik catat dan metode wawancara yang dibantu dengan teknik rekam. Setelah dikumpulkan, data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode agih (distribusional) dengan teknik bagi unsur langsung dan teknik interpretasi. Selanjutnya, data yang telah dianalisis kemudian disajikan dengan metode formal (dengan menggunakan tabel) dan informal (dengan narasi yang deskriptif dan mudah dipahami) dibantu dengan teknik deduktif (penjelasan dari umum ke khusus) dan induktif (dari penjelasan khusus menuju kesimpulan).

3. Hasil

A. Etik dan Kritik dalam Penulisan *Tenganan* dan *Pangangge Suara*

Berdasarkan Pedoman Pasang Aksara Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali (Tim Penyusun, 2002), bentuk-bentuk *tenganan* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Bentuk Penulisan Tengenan

No.	Bentuk Tengenan	Nama	Bentuk Latin	Contoh Penulisan	Alih Aksara
1	... * ³ / ₄	Cecek	Ng	d l* ³ / ₄	dalang
2	... ; ³ / ₄	Bisah	H	k l ; ³ / ₄	kalah
3	... (³ / ₄)	Surang	R	k p(³ / ₄)	kapar
4	... /	Adeg-adeq	Glotal	s s d/	asad

Sumber: Pedoman Pasang Aksara Bali (Tim Penyusun, 2002)

Dari istilah *tengenan*, keempat bentuk di atas merupakan bentuk penanda yang ditempatkan di sebelah kanan *aksara lagna*. Penulisan *cecek* berlaku jika ada suara “ng” di akhir kata. Tetapi jika “ng” ada di tengah kata maka tengenan “ng” ditulis \ , contoh: b \Ð (bangka) dan du \Ði (dungki). Kemudian, jika “ng” muncul dua kali di satu kata dengan konsonan yang sama di setiap suku kata maka digunakan “cecek”, seperti: ec*³/₄ ec*³/₄ (cengceng) dan b*³/₄ bu*³/₄ (bangbung). Penulisan *surang* pun dasarnya adalah suara r “r” di sebelah kanan, tetapi dalam aturannya aksara r tidak boleh di adeg-adeq.

Jika diamati, penulisan *tengenan* yang digunakan untuk menutup suku kata akhir di sebelah kanan menunjukkan karakteristik aksara Bali memunculkan paradigma sistem perjalanan condong ke arah kanan. Dalam arti bahwa, aksara Bali sebagai simbol bunyi sekaligus simbol kosmologi tubuh manusia menjadi pedoman hidup ke arah yang benar/lebih baik.

Atribut aksara Bali lainnya sebagai penanda bunyi vokal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Bentuk Penulisan Pangangge Suara

No.	Bentuk Pangangge Suara	Nama	Bentuk Latin	Contoh penulisan	Alih Aksara
1.	...ø	Ulu	I	hø bø	ibi
2.	...u	Suku	U	bu ku	buku
3.	e...	Taleng	E	em em	meme
4.	e ...o	taleng tedong	O	eRÿ eKÿ	roko
5.	...)	Pepet	E	s) m	sema

Sumber: Pedoman Pasang Aksara Bali (Tim Penyusun, 2002)

Tabel di atas memperlihatkan bentuk-bentuk *pangangge suara* sebagai atribut yang diletakkan di setiap arah *aksara lagna*. Setiap *pangangge suara* akan memberikan jenis vokal (vokal “a” sebagai bunyi pokok). *Ulu* secara leksikal dalam bahasa Bali memiliki arti “hulu/kepala”, *suku* berarti “kaki”, *taleng* berarti “hidung”, *tedong* berarti “kepala, dan *pepet* berarti “rambut”. Ini menandakan bahwa atribut pangangge suara menjadi simbol anggota tubuh yang mana aksara seolah-olah sebagai pusat badan. Secara etik, masing-masing bentuk pangangge suara telah memiliki tempatnya sehingga tidak pantas jika dipindah-pindahkan.


Berkaitan dengan penulisan pangangge suara, kehadiran “ulu” dan “suku” menegaskan kembali bahwa pencoretan aksara Bali disetiap aktifitas penulisan secara tradisi tidak

dibenarkan dan mengurangi unsur estetika. Penulisan “ulu” dan “suku” untuk mematkan suatu aksara yang salah tulis sering dijumpai di dalam khazanah naskah lontar. Dalam tradisi penulisan lontar, penghapusan aksara dilakukan dengan menggenapkan aksara (tubuh), *ulu* (kepala), dan *suku* (kaki) sehingga tidak dapat dibaca. Hal ini dilakukan karena penulisan lontar dengan goresan pisau tulis (*pangrupak*) tidak dapat dihapus. Ini secara eksplisit menekankan etik bahwa jika aksara dicoret seolah-olah badan manusia dilukai sehingga cacat. Etika tersebut juga berimbas pada kritik tajam terhadap manusia sebagai makhluk sosial spiritual untuk memuliakan aksara sebagai stana Sang Hyang Aji Saraswati serta spirit dari tubuh manusia itu sendiri.

B. Etik dan Kritik dalam Penulisan *Gantungan* dan *Gempelan*

Sistem penulisan *gantungan* (di bawah aksara) dan *gempelan* (di sebelah kanan aksara) dipengaruhi oleh sifat alami aksara Bali yang mewakili silabik (suku kata), sehingga untuk membuat sebuah aksara di tengah kata tidak bersuara vokal maka aksara berikutnya patut diletakkan di bawah aksara di depannya alias *magantung* dengan bentuk yang berbeda (beberapa ada yang sama). Beberapa aksara *wianjana* seperti *p* dengan bentuk *gempelan* ...æ dan *s* dengan bentuk *gantungan* dan *gempelan* ...š diletakkan di sebelah kanan. Penulisan *gantungan* dapat dilihat seperti pada contoh *c nÑ* (canda) dan *k sÂ* (kasna), sedangkan *gempelan* seperti *s mæi* (sampi) dan *h \š* (angsa).

Secara logika, untuk menghilangkan vokal pada sebuah aksara dapat menggunakan .../ (*adeg-adeg*) namun hanya boleh di akhir kata seperti contoh *b ò s/* (*bales*) (jika dalam tataran kalimat patut diakhir kalimat, contohnya: *hø b p lu w s^{3/4}Đ c ri k/* . (*I Bapa luas ka carik*)). Penggunaan *adeg-adeg* di tengah kata secara etika penulisan akan mengganggu estetika. Tetapi di balik itu, *adeg-adeg* yang secara leksikal berarti “tiang penyangga” atau “pengikat” (*negul*) secara logika diletakkan di setiap batas (seperti tiang bangunan). Hadirnya *gantungan* atau *gempelan* adalah untuk menyeimbangkan fungsi *adeg-adeg*. *Gantungan* dan *gempelan* pun secara konteks adalah bagian dari tubuh aksara (sekali bagian tubuh manusia seperti payudara, palus, dan buah pelir).

Penulisan *gantungan* dalam Pasang Aksara Bali secara khusus tidak diperbolehkan tumpuk tiga (*gantungan* diberikan *gantungan*). Ada beberapa kata dalam penulisan latin mengandung 3 deret konsonan seperti “tamblang”, jika sesuai kaidah *gantungan* maka ditulis  namun tidak benar. Untuk mencegah tumpuk tiga, maka digunakanlah *adeg-adeg* untuk menghikangkan vokal pada aksara *m* sehingga menjadi *t m/ bP^{*3/4}* . Hal ini menjadi pengecualian bagi *adeg-adeg* di tengah kata dan menegaskan bahwa tumpuk tiga

sama sekali tidak diperbolehkan di dalam pasang aksara Bali. Secara etik yang logis, aksara yang *magantung* diberi *gantungan* tentu mengambil spasi yang lebih ke bawah. Secara manusiawi, apapun yang bergantung jika digantungi lagi oleh sesuatu yang lain makan akan menambah beban. Secara kritik, hal tersebut menekankan kepada keseimbangan hidup dalam arti suatu beban tidak patut dibebani oleh apapun yang mengganggu stabilitas kehidupan.

C. Etik dan Kritik dalam Penulisan Arda Suara (Bentuk Semi Vokal)

Berkenaan dengan etik dan kritik pada penulisan gantungan di atas, penulisan arda suara atau semi vokal juga sering dikaitkan dengan kasus tumpuk tiga. Dalam hal ini terjadi ketika aksara ardha suara seperti y “ya”, r “ra”, dan w “wa” hadir dalam bentuk *gantungan* ...ê (*nania*), ...É (*guwung*), dan ... Û (*suku kembung*). Jika diterapkan dalam penulisannya, seperti: b \Đí*¾ “*bangkyang*”, Zÿu \ĐË&¾ “*nyungkring*”, dan s) \áÛ n/ “*sengguan*” seakan-akan itu adalah tumpuk tiga. Namun, pada kenyataannya kasus tersebut bukanlah tumpuk tiga. *Nania*, *guwung*, dan *suku kembung* mengambil peran sebagai *arda suara* (semi vokal) sehingga boleh ditulis di bawah *gantungan*. *Arda suara* dalam pengertian pasang aksara Bali merupakan penanda bunyi (semi vokal) sama seperti “ulu”, “suku”, “taleng”, dan yang lainnya bagi *gantungan* di atasnya.

Secara etika penulisan, hadirnya *arda suara* “ya”, “ra”, dan “wa” tidak menghabiskan spasi di area bawah dengan sedikit penyesuaian bentuk. Hal itupun dikuatkan secara etika sosial bahwa bunyi dalam konteks suara/bicara/ucapan menjadi unsur pokok yang menguatkan eksistensi manusia dalam kehidupan. Secara kritik, ucapan diluar kendali akan menyebabkan permasalahan bahkan konflik sosial.

4. Pembahasan

Pasang aksara Bali yang tidak hanya melibatkan *aksara lagna* (aksara pokok) tetapi juga menghadirkan bentuk-bentuk lain seperti pangangge suara, tengenan, gantungan, dan arda suara. Aksara Bali yang dalam budaya keberaksaraan di Bali sangat dekat dengan esensi manusia. Nenek moyang Bali yang menciptakan sistem keberaksaraan tentunya melahirkan sistem penulisan sebagai pengejawantahan diri manusia. Aksara di dalam berbagai tradisi sangat diperankan dan difungsikan sebagai sarana penyucian alam dan manusia bersifat spiritual selain upakara (banten). Begitu juga manusia memiliki kemampuan menghadirkan aksara sebagai simbol kehadiran dirinya yang diperuntukkan sebagai persembahan. Dalam hal ini, aksara Bali dan manusia Bali merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks sosial spiritual budaya Bali.

Apa yang dikemukakan di atas akan dibuktikan dari segi karakteristik bentuk dan sistem penulisan yang mencerminkan manusia itu sendiri. Sistem penulisan aksara Bali yang berhubungan dengan tradisi *nyastra* diyakini sebagai usaha menghidupkan aksara (*ngurip aksara/nyolahang sastra*). Tanda aksara itu hidup yaitu dari sistem penulisannya yang mencerminkan tingkah laku yaitu *masuara* (bersuara), *mapangangge* (berpakaian/beratribut), *magantung* (bergantung), *ngempel* (melekat), *nengen* (condong ke kanan). Inilah etik secara humanitis yang ditunjukkan oleh aksara Bali.

A. Masuara

Bunyi aksara Bali sejatinya dapat dibedakan antara konsonan dan vokal walaupun keduanya bersuara vokal. Pangange suara berfungsi untuk membentuk aksara bersuara vokal “i”, “u”, “e”, “o”, dan “ë”. “ulu”, “suku”, “taleng”, “tedong”, dan “pepet” menempati empat posisi arah mata angin, yang mana aksara berada di tengah-tengah. Ini menjadi representasi relasi keseimbangan literasi dan kosmologi (manusia dan alam). Suara atau ucapan dalam tindakan sosial manusia merupakan salah satu etika yang paling penting dan paling berpengaruh di dalam stabilitas kehidupan sosial. Komunikasi menjadi penghubung yang akan menciptakan ikatan sosial yang kuat di dalam kehidupan masyarakat. Komunikasi juga dapat ditempatkan dalam posisi kritis untuk menyikapi problema sosial namun patut sejalan dengan unsur etis. Banyak konflik sosial masyarakat disebabkan oleh komunikasi yang kurang tepat hingga menyebabkan ketersinggungan dan perselisihan. Aksara Bali mengajarkan manusia untuk mengingat batasan ucapan dengan mengindahkan situasi, patisipan, dan waktu yang tepat.

B. Mapangangge

Aksara dan manusia sama-sama menggunakan pakaian sebagai identitas fisik. Relasi inipun menunjukkan bahwa di momentum tertentu identitas patut disesuaikan. Seperti misalnya seorang guru menggunakan seragam guru pada saat mengajar di sekolah, namun di kala bertugas mengamankan jalannya upacara adat, ia mengenakan pakaian pecalang. Aksara Bali yang lengkap dengan *pangangge* ibarat pakaian yang membuatnya terbaca dan mampu menyampaikan maksud dan informasi digunakan sesuai dengan fungsinya. Pangangge aksara dalam konteks kemanusiaan juga dapat dikaitkan dengan fungsi seseorang di dalam kehidupan masyarakat. Sistem dalam pangangge aksara juga mencerminkan sistem sosial seperti pemimpin, pelaksana, pengarah, penuntun, hingga penanggung jawab. Kesemua itu akan menciptakan keselarasan jika berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jika tidak, maka akan muncul masalah yang mengganggu kestabilan

suatu sistem kemasyarakatan.

C. Magantung

Tingkah polah aksara Bali yang salah satunya unik yaitu mengenal bentuk *gantungan*. *Gantungan* menunjukkan karakteristik aksara Bali yang tidak selalu mengambil peran sentral tetapi juga mampu mengambil peran di bawah sehingga dalam keadaan apapun dapat mendukung keterbacaan. Perilaku tersebut menegaskan etika sosial masyarakat yang patut beradaptasi di segala kondisi. Jika seseorang dibutuhkan di posisi penting maka ia harus bersedia menyesuaikan diri dan mengambil perannya secara maksimal. Jika ia dibutuhkan untuk menyokong dari bawah, maka ia juga patut siap menjadi pendukung. Karakter ini sangat mengkritik orang-orang yang hanya nyaman ketika berada di atas dengan menggunakan kewenangannya untuk mengatur dan menguntungkan diri sendiri tanpa mengusahakan kebaikan bersama. Perilaku *magantung* yang direpresentasikan oleh aksara Bali menunjukkan bahwa seseorang tidak selamanya harus berperan sebagai komando. Ada kalanya ia harus mengikuti arahan siapapun untuk kebaikan bersama. Seperti contoh seorang gubernur sebagai pemimpin daerah tertentu yang berwenang menentukan arah kebijakan sehingga seluruh masyarakatnya wajib menaatinya. Tetapi, pada saat upacara keagamaan Hindu, seorang gubernur harus tunduk kepada seorang sulinggih yang memimpin jalannya upacara tanpa alasan apapun. Hal ini menunjukkan kritik terhadap orang-orang yang merasa selamanya penting sehingga ia pantas menjadi pemimpin seterusnya sampai-sampai menganggap dirinya sebagai pemimpin yang paling benar.

D. Ngempel

Selain *magantung*, aksara Bali memiliki bentuk *gempelan* yang diletakkan di belakang aksara. Hal ini selaras dengan karakteristik *gantungan* dalam konteks perputaran fungsi sosial. *Ngempel* menekankan posisi manusia berada di belakang sebagai pendorong. Secara etik, manusia sebagai makhluk sosial patut menjalankan fungsinya sebagai pendukung kepentingan masyarakat. Salah satunya memberikan bantuan, dorongan, dan motivasi bagi orang yang ditimpa kesulitan. *Gempel* secara leksikal juga berarti lekat atau melekat. Dalam konteks tersebut, manusia juga diharapkan mampu memelihara hubungan erat dengan masyarakat sehingga tidak lahir kelompok-kelompok yang memicu perpecahan dan perselisihan. Karakteristik aksara Bali yang *ngempel* menekankan bahwa kehidupan bermasyarakat patut dijalankan dengan kerjasama yang baik yaitu saling mendukung dan saling membantu satu sama lain tanpa motif kepentingan individu.

E. Nengen

Dalam bentuk-bentuk tertentu, penulisan aksara Bali dengan tengenan menjadi aturan yang patut dipatuhi. Hal ini berarti, di dalam keterbacaan aksara Bali, *tengenan* menjadi aturan atau panduan penting. Dengan kata lain, aksara Bali yang sangat difungsikan di dalam berbagai tradisi budaya keagamaan menjadi pegangan kuat bagi masyarakat. Secara etika sosial, aksara Bali yang *nengen* merepresentasikan kedudukan manusia yang patut mengusahakan diri menjadi tangan kanan (baca: kepercayaan). Sebuah kepercayaan menjadikan seseorang memiliki nilai tambah bagi suatu usaha agar usaha tersebut dapat tercapai sesuai dengan harapan. Di dalam kehidupan sosial, seseorang yang memiliki kemauan sungguh-sungguh di dalam bekerja sama dan menciptakan kehidupan yang harmonis akan dipercaya sepenuhnya menjadi seorang pemimpin masyarakat. Dengan kata lain, citra seseorang akan memengaruhi kepercayaan sosial kepada dirinya sehingga kepercayaan tersebutlah yang memberikannya posisi. Hal ini sekaligus menjadi kritik bagi seseorang yang hanya mementingkan jabatan daripada membangun citra dan kepercayaan sosial.

5. Simpulan

Aksara Bali dengan sistem penulisan pasang aksara Bali yang telah menjalani riwayat dinamika panjang tidak hanya merepresentasikan aspek keterbacaan secara literasi, tetapi juga mengisyaratkan aspek yang lebih luas salah satunya mengenai etik dan kritik sosial. Etik dan kritik yang dapat digali jika ditularkan dan dialami tentunya akan membentuk karakteristik manusia unggul dan berkepribadian di dalam mengusahakan kestabilan kehidupan sosial. Dengan demikian, aspek kontekstual yang terkandung di dalam sistem penulisan aksara Bali patut disebarluaskan ke berbagai lapisan masyarakat salah satunya di dalam dunia pendidikan.

Belajar aksara Bali sejatinya tidak semata belajar hal ikhwal keberaksaraan untuk mampu mengetahui sumber-sumber literasi warisan leluhur, tetapi juga belajar membentuk kepribadian diri untuk bisa menjadi sosok yang berperan penting di dalam kehidupan masyarakat. Karakteristik penulisan aksara Bali seperti masuara, mapangangge, magantung, dan ngempel, merupakan norma-norma eksplisit yang patut dikuak untuk mengedukasi masyarakat yang kental dengan dinamika sosial, kemerosotan moral, konflik, dan kesenjangan yang dilahirkan oleh perkembangan zaman.

6. Daftar Pustaka

Adhiti, I.A.I., Artajaya, G.S., & Pidada, I.A.P. (2021). Emberdayaan Bahasa, Sastra, Dan

- Aksara Bali Terhadap Penyuluh Bahasa Bali. *Widyadari*. 22(2). 562-571.
- Agastia, I B.G. (2005). *Aksara Bali, Skriptografi dan I Gusti Ngurah Bagus. Keberaksaraan dalam Kebudayaan*. Denpasar: Program Studi Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Antara, I.G.N. (2020). *Aksara Bali di Ruang Publik Sesuai Hasil Pasamuhan Alit Bahasa Bali 2019*. *Jurnal Santi*. 4(1). 77-85.
- Duija, I.N. (2017). *Keberadaan Aksara Wresastra dalam Aksara Bali*. *Aksara*. 29(1). 19-32.
- Kamaruddin, I., Zulham, Z., Utama, F., & Fadilah, L. (2023). *Pendidikan karakter di sekolah: Pengaruhnya terhadap Pengembangan Etika Sosial dan Moral Siswa*. *Attractive: Innovative Education Journal*. 5(3). 140-150.
- Leba, B.S., Mare, F.J., & Lein, N.O. (2024). *Analisis Etnosemantik Tuturan Verbal dan Tindakan Nonverbal Tradisi Gehan Tena pada Masyarakat Lewoawang*. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*. 4(10). 2925-2939.
- Maharani, T., & Nugrahani, A. (2019). *Toponimi Kewilayahan Di Kabupaten Tulungagung (Kajian Etnosemantik dan Budaya)*. *Belajar Bahasa*. 4(2). 223-230
- Paramarta, I.K., Martha, I.N., & Astiti, S.G.L.W.C. (2024) *Ghancaran Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 5(2). 338-351.
- Rai, I.B. (2013). *Perkembangan Pasang Aksara Bali dalam Upaya Pelestarian Budaya Bali*. *Jurnal IKA*. 11(2). 16-26.
- Swartz, H.J.E.F. (1931). *Oeger-oeger Aksara saha Pasang Sasoeratan Basa Bali Kapara*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Setiabudy, R. (2025). *Kritik dan Etika*. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*. 9(3). 93-97.
- Sitompul, Y.S. *et al.* (2024). *Kesopansantunan dalam Pergaulan Batak Toba Suatu Perspektif Etika Sosial: Kajian Normatif*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 8(3). 49758-49763.
- Tim Penyusun. (2002). *Pedoman Pasang Aksara Bali*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
- Pusparini, I.A.P.E., Aryana, I.B.P.M., & Purnami, I.A.P. (2020). *Analisis Kesalahan Dalam Penulisan Aksara Bali Pada Papan Nama Instansi Se-Kecamatan Buleleng*. *Jurnal Pendidikan Bahasa Bali Undiksha*. 7(1). 11-20.
- Yunira, S., Pradina, S., Sumbayak, M., Putri, N. S., & Derin, T. (2019). *Re-Visits the Grand Theory of Geoffrey Leech: Seven Types of Meaning*. 1(3), 105–110.